

Akuntansi Budaya dan Keberlanjutan Keuangan Berbasis Komunitas dalam Upacara Adat Karo

Ihsanul Windasari

Akuntansi Syariah, Universitas Al-Qolam Malang

E-mail: ihsanulwindasari@alqolam.ac.id

Diterima: 6 Januari 2026

Direvisi: 22 April 2026

Disetujui: 26 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to reveal the application of cultural accounting and its relation to community-based financial sustainability in the Karo traditional ceremony of the Tenggerese community. The ceremony is not only a religious ritual but also a sustainable community-based economic system emphasizing cooperation, transparency, trust, and cultural continuity. The financing process runs without formal accounting records, yet accountability is maintained through community participation in fund management. This research uses a qualitative approach with an ethnographic method involving interviews, observation, and document analysis. The results show that financing the Karo traditional ceremony is collective, where members contribute money, goods, or labor so no individual bears an economic burden. Community deliberation ensures transparency, with financial decisions discussed openly to prevent misuse. Collected funds are used for ceremonial needs and long-term goals such as temple maintenance, cultural education, and heritage preservation. The findings indicate that cultural accounting within the Tenggerese community embodies sustainability by integrating economic, social, and spiritual values to maintain traditions, strengthen solidarity, and preserve cultural identity amid modernization.

Keywords: *Cultural Accounting, Sustainability, Community-Based Finance, Accountability, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Sektor publik dan komunitas di Indonesia menjalankan fungsi yang beragam, mulai dari pelayanan administratif hingga perlindungan dan pewarisan identitas budaya. Selain mengelola pendapatan dan belanja negara, organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset sosial dan budaya tetap memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Perspektif ini

mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar pelaksanaan transaksi keuangan menuju upaya perlindungan warisan budaya sebagai bagian integral dari kesejahteraan kolektif. Pelestarian warisan budaya kini dipahami sebagai bagian dari penciptaan nilai publik, khususnya dalam masyarakat yang sistem budayanya menjadi landasan pengorganisasian sosial dan ekonomi (Vu Hoang, 2021). Berbeda dengan entitas sektor swasta yang umumnya berorientasi pada maksimalisasi laba dan efisiensi ekonomi, sistem sektor publik dan komunitas adat lebih menekankan transparansi, akuntabilitas sosial, serta norma-norma komunal sebagai bentuk pengelolaan dan penjagaan sumber daya bersama. Nilai-nilai tersebut memengaruhi cara sumber daya dialokasikan, bagaimana keputusan dibenarkan, serta bagaimana tanggung jawab dibagi di antara anggota komunitas (Dawson et al., 2021; Poelzer et al., 2023). Orientasi ini sejalan dengan diskursus nilai publik yang menegaskan bahwa pemerintah dan institusi lokal tidak hanya dituntut mencapai kinerja keuangan, tetapi juga menjalankan fungsi reproduksi sosial dan budaya (Ferry et al., 2019; Wang et al., 2022). Dalam masyarakat adat dan komunal, pengaturan sumber daya tidak semata-mata bersumber dari kerangka hukum formal, melainkan juga dari aturan adat dan kewajiban moral yang kerap memiliki legitimasi lebih kuat dibandingkan institusi negara formal (Nugroho et al., 2019; Sherpa, 2024). Dalam konteks tersebut, proses pengambilan keputusan menekankan konsensus, kekerabatan, dan resiprositas sosial, sehingga sistem akuntabilitas dibangun berdasarkan identitas kolektif dan ekspektasi budaya, bukan melalui pelaporan yang terstandarisasi (Jayasinghe et al., 2021; Thahirah et al., 2025).

Dalam kerangka ini, ritual dan tradisi budaya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas kolektif dan kesinambungan antargenerasi. Ritual tidak hanya dipahami sebagai tindakan simbolik, melainkan juga sebagai mekanisme institusional yang menanamkan partisipasi komunal serta mengintegrasikan tata kelola sumber daya ke dalam tatanan budaya. Dalam banyak masyarakat tradisional, kewajiban ritual membentuk cara sumber daya dimobilisasi, didistribusikan, dan diawasi, sehingga pembiayaan praktik budaya seperti upacara, persembahan, atau penghormatan leluhur dapat dipertahankan lintas generasi (Aptasari et al., 2024; Astina et al., 2021). Partisipasi berulang dalam ritual memperkuat rasa memiliki, mendorong pengorbanan bersama, serta melanggengkan pertukaran resiprokal yang mengikat individu pada tujuan kolektif (Mentel, 2022). Di Indonesia, khususnya pada komunitas pegunungan atau agraris, ritual tetap menjadi jangkar kohesi sosial dan sirkulasi sumber daya. Upacara berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk menegaskan identitas kolektif sekaligus mempraktikkan pengelolaan keuangan dan material secara kooperatif yang berakar pada adat dan kepercayaan. Praktik-praktik ini mempertahankan prinsip tata kelola yang telah lama berkembang dan berpotensi tergerus oleh modernisasi, sehingga ritual berperan dalam menjaga kesinambungan budaya dan ketahanan ekonomi secara bersamaan.

Pada lanskap tersebut, akuntansi budaya berkembang sebagai bidang kajian yang menelaah bagaimana pengelolaan sumber daya tertanam dalam struktur budaya dan simbolik. Berbeda dari pandangan yang memosisikan akuntansi sebagai aktivitas teknis yang netral, akuntansi budaya menekankan bahwa banyak masyarakat tradisional mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan makna simbolik, ekspektasi moral, dan keyakinan spiritual yang memengaruhi keputusan alokasi sumber daya (Flesher & Flesher, 2022; Hidayah et al., 2019). Dalam perspektif ini, praktik

akuntansi berlandaskan nilai-nilai yang melampaui pengukuran moneter semata. Kontribusi masyarakat baik dalam bentuk uang, hasil produksi, maupun tenaga kerja tidak dipahami sekadar sebagai pertukaran ekonomi, melainkan sebagai wujud kewajiban sosial, resiprositas, dan pengabdian spiritual. Praktik tersebut mencerminkan ekonomi moral, di mana keputusan sumber daya berkaitan erat dengan pemahaman kosmologis dan identitas kolektif, bukan semata-mata efisiensi atau laba. akuntansi budaya tidak hanya berfungsi mencatat arus keuangan, tetapi juga menyoroti keterkaitan antara penggunaan sumber daya, identitas budaya, pelestarian warisan, dan mekanisme akuntabilitas informal. Keputusan mengenai kontribusi, penggunaan dana, dan distribusi manfaat dimediasi oleh norma komunitas, peran ritual, serta sistem kepercayaan bersama. Akuntabilitas dijalankan secara publik melalui musyawarah komunitas atau pertemuan ritual, yang memperkuat transparansi dan kepercayaan tanpa bergantung pada laporan formal atau dokumentasi tertulis. Dalam kerangka ini, akuntansi dipahami sebagai ekspresi budaya yang menjaga warisan berwujud dan tak berwujud, sekaligus menjelaskan bagaimana komunitas tradisional mampu mengelola sumber daya keuangan dan nonkeuangan secara efektif untuk mendukung keberlanjutan ritual. Praktik tersebut memelihara kohesi sosial, memperkuat rasa kebersamaan, dan memastikan keberlanjutan pengetahuan serta tradisi budaya lintas generasi.

Contoh relevan dari praktik tersebut adalah upacara Karo pada masyarakat Tengger di kawasan Bromo–Tengger–Semeru, Jawa Timur. Masyarakat Tengger dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan sistem kepercayaan leluhur (Hindu-Tengger) serta praktik komunal yang relatif minim intervensi eksternal (Haryanto, 2014; Huda, 2019). Upacara Karo diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan upaya menjaga keseimbangan kosmis komunitas. Ritual ini mengintegrasikan unsur spiritual, partisipasi berbasis kekerabatan, dan pengorganisasian sumber daya secara kolektif, yang menegaskan peran sentral ritual dalam pemeliharaan identitas budaya. Anggota komunitas memberikan kontribusi berupa uang, hasil pertanian, ternak, dan tenaga kerja yang mencerminkan nilai gotong royong, resiprositas, serta kewajiban spiritual kepada leluhur (Prasetyo, 2022). Kontribusi tersebut tidak diperlakukan sebagai transaksi moneter terpisah, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan kosmologis. Ketahanan sistem pembiayaan upacara Karo terhadap tekanan ekonomi modern, seperti inflasi dan kenaikan biaya kebutuhan ritual, ditopang oleh pola kontribusi yang bersifat kolektif dan fleksibel. Beban pembiayaan tidak ditanggung oleh individu tertentu, melainkan didistribusikan kepada seluruh anggota komunitas sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Selain berbentuk uang, kontribusi juga diwujudkan dalam bentuk hasil pertanian, ternak, bahan pangan, serta tenaga kerja, sehingga kebutuhan upacara tidak sepenuhnya bergantung pada transaksi pasar modern. Pola tersebut menjadikan sistem pembiayaan ritual relatif lebih adaptif terhadap fluktuasi ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang sulit sekalipun, masyarakat tetap mempertahankan partisipasi karena upacara Karo dipandang sebagai kewajiban moral dan spiritual kepada leluhur. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya dalam masyarakat Tengger membentuk sistem akuntansi yang tertanam secara budaya, di mana pencatatan, alokasi, dan distribusi sumber daya diatur oleh norma adat, bukan oleh pelaporan keuangan terstandarisasi. Mobilisasi sumber daya untuk upacara Karo tidak hanya mereproduksi budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme tata

kelola informal yang menjamin kesinambungan pembiayaan ritual. Sumber daya dikumpulkan dan dialokasikan melalui otoritas adat yang dipimpin oleh tetua desa dan pemuka ritual, berlandaskan prinsip keadilan, relasi kekerabatan, serta akuntabilitas vertikal kepada leluhur (Sherpa, 2024; Steenbergen, 2016). Akuntabilitas dijalankan secara komunal melalui musyawarah terbuka dan pelaksanaan peran ritual, sehingga memperkuat kepercayaan dan transparansi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komunitas adat mengoperasionalkan akuntansi dengan cara yang berbeda dari model korporasi, dengan mengintegrasikan identitas, moralitas, dan spiritualitas dalam pengambilan keputusan (Narayan & Oru, 2024; Vidwans & De Silva, 2023). Penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa ruang ritual berfungsi sebagai arena negosiasi dan pelaksanaan pengaturan ekonomi secara kolektif (Coyne & Mathers, 2011). Namun demikian, kajian yang menelaah bagaimana upacara ritual tradisional mengoperasionalkan alokasi sumber daya dan akuntabilitas sebagai bentuk akuntansi berbasis budaya khususnya pada komunitas dataran tinggi di Indonesia masih terbatas. Selain itu, bukti empiris mengenai bagaimana praktik tersebut menopang kesinambungan keuangan tanpa dokumentasi formal juga relatif minim.

Celah penelitian ini terletak pada kurangnya perhatian terhadap peran praktik akuntansi yang tertanam secara budaya dalam mendukung kesinambungan keuangan upacara ritual tradisional di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi budaya dan akuntabilitas masyarakat adat dengan menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak semata-mata bersifat formal atau berorientasi laba, melainkan tertanam dalam norma lokal yang menjunjung resiprositas, makna simbolik, dan tanggung jawab komunal.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) nilai-nilai budaya dan spiritual apa yang tercermin dalam pembiayaan upacara Karo pada masyarakat Tengger, dan (2) bagaimana praktik akuntansi budaya dijalankan dalam pengelolaan keuangan ritual tersebut. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya perspektif akuntansi budaya, khususnya dalam memahami bagaimana tradisi ritual masyarakat adat di Indonesia dipertahankan secara finansial melalui praktik yang tertanam dalam budaya, serta menegaskan pentingnya keberlanjutan keuangan berbasis komunitas dalam mendukung pelestarian warisan upacara tradisional.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merujuk pada proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aktivitas keuangan publik yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas (Panggeso et al., 2024). Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang berorientasi pada perolehan laba, akuntansi sektor publik berfokus pada pelayanan kepentingan publik serta pengelolaan sumber daya yang sebagian besar berasal dari pajak dan pendapatan negara (Erlina et al., 2017). Dalam lingkup akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan berfungsi menyediakan informasi mengenai aktivitas keuangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sementara itu, akuntansi sosial diterapkan pada lembaga nirlaba dan nonpemerintah, seperti yayasan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Penekanan utama akuntansi sosial terletak pada upaya menunjukkan akuntabilitas dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial, bukan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, apabila akuntansi pemerintahan berorientasi pada keterbukaan informasi keuangan publik, maka akuntansi sosial menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab demi kepentingan sosial kolektif, bukan pada orientasi laba.

Nilai Budaya Hofstede

Hofstede (1980) memaknai budaya sebagai suatu bentuk *mental programming*, yaitu pola berpikir, nilai, dan norma yang dipelajari dan dibagikan bersama, yang membentuk perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. *Mental programming* ini beroperasi pada tiga tingkat, yaitu universal, kolektif, dan individual. Pada tingkat universal, manusia memiliki kecenderungan perilaku dasar yang bersumber dari kebutuhan biologis dan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, mengekspresikan emosi, serta membentuk kelompok sosial. Pada tingkat kolektif, budaya menjadi khas bagi kelompok sosial tertentu dan dibentuk oleh sejarah bersama, tradisi, serta norma sosial yang diwariskan. Nilai-nilai yang dipelajari secara kolektif ini memengaruhi bahasa, pola interaksi sosial, ritual, praktik simbolik, serta sikap terhadap otoritas dan kerja sama. Orientasi kolektif tersebut menjelaskan mengapa komunitas seperti masyarakat Tengger mengorganisasikan partisipasi ritual, kontribusi keuangan, dan pembagian sumber daya berdasarkan adat istiadat yang diwariskan, bukan berdasarkan aturan institusional formal.

Pada tingkat individual, *programming* budaya dimodifikasi oleh pengalaman pribadi, pendidikan, dan lingkungan sosial, sehingga menghasilkan variasi sikap dan tindakan di antara individu-individu dalam kelompok budaya yang sama. Hofstede menggambarkan budaya sebagai “*software of the mind*”, yang menekankan bahwa budaya dipelajari secara bertahap melalui proses sosialisasi, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya, tempat kerja, hingga masyarakat luas. Karena budaya bersifat abstrak, Hofstede menegaskan bahwa nilai dan praktik merupakan komponen budaya yang dapat diamati dan dianalisis. Norma-norma budaya tersebut membentuk dasar simbolik yang melegitimasi praktik pembiayaan ritual. Oleh karena itu, perspektif Hofstede membantu menjelaskan bagaimana *cultural programming* memengaruhi partisipasi keuangan dan kewajiban moral masyarakat dalam pelaksanaan praktik-praktik seremonial.

Akuntansi Budaya

Akuntansi budaya merujuk pada praktik akuntansi yang tertanam dalam nilai-nilai lokal, norma sosial, dan pandangan hidup masyarakat, alih-alih bertumpu pada sistem modern yang terstandarisasi. Dalam hal ini, budaya menjadi faktor penentu dalam cara individu dan komunitas memaknai kewajiban keuangan, menilai sumber daya, serta mewujudkan akuntabilitas (Gray, 1998). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik budaya dapat memengaruhi perilaku pelaporan, tingkat transparansi, serta cara masyarakat menafsirkan tanggung jawab keuangan (Priyastiwati, 2016). Dalam konteks lokal dan masyarakat adat, praktik akuntansi sering kali berlangsung secara informal melalui komunikasi lisan, musyawarah komunitas, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, bukan melalui dokumentasi yang terstruktur dan tertulis.

Pada masyarakat Tengger, kontribusi sumber daya dalam pelaksanaan ritual Karo tidak dipahami semata-mata sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai kewajiban spiritual dan bentuk investasi sosial yang bersifat resiprokal. Kontribusi berupa hasil pertanian, ternak, sesaji, dan tenaga kerja mengandung makna simbolik serta merepresentasikan aset budaya tak berwujud. Keputusan mengenai alokasi keuangan tidak ditentukan oleh mekanisme pasar atau pencatatan formal, melainkan diarahkan oleh otoritas adat dan proses deliberasi kolektif yang melibatkan partisipasi terbuka masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan perspektif akuntansi budaya, yang menegaskan bahwa praktik akuntansi dalam konteks tradisional berakar kuat pada makna simbolik, nilai kolektif, dan tanggung jawab sosial, serta tidak berorientasi pada pencapaian laba.

Konsep Biaya

Konsep biaya merujuk pada pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam akuntansi, biaya umumnya dinyatakan dalam satuan moneter dan merepresentasikan nilai sumber daya yang dikorbankan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima (Choudhary & Rodrigues, 2025). Biaya dapat mencakup pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, serta input lain yang diperlukan guna mendukung aktivitas operasional. Biaya lazim diklasifikasikan berdasarkan sifat, keterlacakan, dan perilakunya. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasi secara spesifik dengan suatu produk, jasa, atau aktivitas tertentu, sedangkan biaya tidak langsung mendukung operasi secara keseluruhan dan tidak dapat ditelusuri pada satu output tertentu. Selain itu, biaya juga dapat dibedakan menjadi biaya tetap, yang jumlahnya relatif konstan meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas, dan biaya variabel, yang besarnya berubah seiring dengan volume aktivitas. Klasifikasi ini membantu manajemen dalam memahami respons biaya terhadap perubahan operasional serta dalam merencanakan alokasi sumber daya secara lebih efisien.

Dari perspektif akuntansi keuangan, konsep biaya tidak hanya relevan dalam menentukan besarnya pengeluaran, tetapi juga berperan penting dalam proses penilaian dan pelaporan. Konsep biaya historis, misalnya, digunakan sebagai dasar pengukuran nilai aset pada saat perolehan, sementara kerangka pelaporan keuangan tertentu memungkinkan penyesuaian berdasarkan nilai wajar. Oleh karena itu, informasi biaya menjadi elemen esensial dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan. Di luar fungsi pelaporan, informasi biaya juga mendukung proses pengambilan keputusan manajerial, termasuk penyusunan anggaran, penetapan harga, evaluasi kinerja, dan pengendalian biaya. Pengukuran biaya yang akurat memungkinkan organisasi untuk memantau efisiensi, mengidentifikasi pemborosan, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Pemahaman terhadap perilaku biaya juga membantu dalam mengantisipasi konsekuensi keuangan di bawah berbagai kondisi operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya dan praktik keuangan informal tertanam dalam pembiayaan ritual upacara Karo pada masyarakat Tengger di Tosari, Jawa Timur. Pendekatan etnometodologi dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap cara anggota komunitas membangun

makna, mengoordinasikan tindakan, serta mempertahankan praktik akuntansi melalui interaksi sehari-hari dan logika budaya yang dibagikan bersama. Alih-alih menerapkan kategori analitis eksternal, pendekatan ini memberikan ruang bagi interpretasi masyarakat adat untuk muncul secara alami melalui prinsip indeksikalitas dan reflektivitas (Burrell & Morgan, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi lapangan dilaksanakan pada tahap awal penelitian untuk memahami konteks interaksi komunal, pembagian peran dalam persiapan ritual, serta mekanisme mobilisasi sumber daya. Peneliti hadir sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan upacara Karo, serta terlibat dalam berbagai setting komunitas, baik formal maupun informal. Observasi tersebut dilengkapi dengan percakapan informal sebagai upaya membangun kepercayaan dengan informan, yang selanjutnya diikuti dengan wawancara semi-terstruktur.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif dan diperluas melalui teknik *snowball* guna memastikan kedalaman dan kekayaan data. Informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan ritual, norma budaya, serta praktik keuangan komunitas. Informan kunci meliputi pemuka ritual (dukun adat), kepala desa, serta anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam proses persiapan dan pengalokasian sumber daya ritual. Rincian informan disajikan dalam Tabel 1.

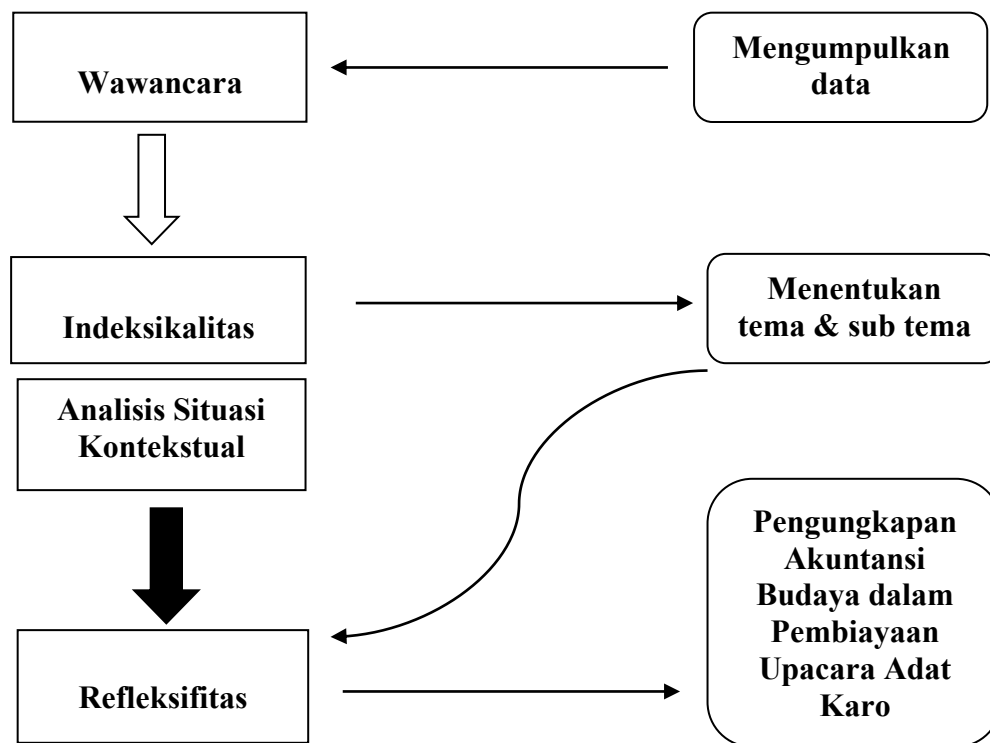
Tabel 1. Data Informan

Nama	Posisi	Kaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya
Sutomo	Dukun Adat	Penentu alokasi sesaji dan pemegang otoritas spiritual atas kontribusi warga dalam pelaksanaan upacara Karo.
Rudi Hartono	Kepala Desa	Mengoordinasikan partisipasi masyarakat serta mendukung pengelolaan dan distribusi sumber daya ritual.
Ida	Warga	Berpartisipasi langsung dalam kontribusi dana, tenaga, dan kebutuhan ritual sebagai bagian dari praktik gotong royong komunitas.

Wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada dua ranah utama kajian. Pertama, nilai-nilai budaya dan spiritual yang melandasi komitmen keuangan kolektif dalam komunitas. Kedua, cara pengorganisasian dan pengelolaan keuangan ritual dalam pelaksanaan upacara. Pertanyaan-pertanyaan inti tersebut selanjutnya dikembangkan melalui *thematic probes* untuk menggali lebih dalam bagaimana kontribusi dimobilisasi, bagaimana keputusan terkait pengeluaran ditetapkan, serta bagaimana mekanisme akuntabilitas dijalankan dalam konteks komunal. Selama proses wawancara berlangsung, pertanyaan tambahan muncul seiring dengan berkembangnya tema-tema baru, sehingga memungkinkan interpretasi yang lebih kaya terhadap perspektif komunitas. Data dokumenter digunakan untuk mendukung dan memverifikasi temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Apabila tersedia, dokumen berupa foto, catatan lapangan, jadwal pelaksanaan upacara, serta catatan tertulis informal seperti pencatatan kontribusi masyarakat, daftar kebutuhan sesaji, dan catatan manual terkait pembagian tugas maupun penggunaan sumber daya ritual turut dikumpulkan sebagai bagian dari data penelitian. Material tersebut melengkapi data utama dengan memberikan pemahaman kontekstual mengenai pola

pembiayaan ritual dan ekspresi simbolik yang melekat dalam praktik alokasi sumber daya.

Analisis data dilakukan melalui proses iteratif yang berlandaskan prinsip indeksikalitas, reflektivitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan etnometodologi. Prinsip indeksikalitas digunakan untuk mengidentifikasi serta mengkategorikan ekspresi, praktik, dan tindakan yang bersifat kontekstual, sehingga penafsiran data senantiasa mempertimbangkan makna situasional yang dibangun dalam interaksi sosial komunitas. Selanjutnya, reflektivitas digunakan sebagai kerangka analitis untuk menautkan narasi verbal informan dengan perilaku yang teramati, guna mengungkap keterkaitan antara praktik sehari-hari dan logika budaya yang lebih luas. Proses ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana makna sosial dan praktik keuangan dikonstruksi serta direproduksi melalui interaksi komunal. Tahap akhir analisis difokuskan pada dimensi akuntabilitas, dengan menelusuri pola-pola relasional yang mencakup bentuk kontribusi komunitas, mekanisme musyawarah, serta praktik alokasi dan distribusi sumber daya. Analisis ini diarahkan untuk memahami bagaimana keberlanjutan keuangan berbasis komunitas tidak hanya dipertahankan, tetapi juga direproduksi secara berkelanjutan dalam setiap siklus pelaksanaan upacara.



Gambar 1. Tahap Penelitian

Triangulasi diterapkan melalui berbagai dimensi, meliputi sumber data seperti pemuka ritual, aparat desa, dan anggota masyarakat metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen, serta waktu pengumpulan data yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan upacara. Penerapan triangulasi tersebut bertujuan untuk menjamin keandalan dan validitas temuan, sehingga hasil

penelitian merefleksikan realitas komunitas secara akurat serta mampu mengungkap logika akuntansi budaya yang tertanam dan dipraktikkan dalam pelaksanaan upacara Karo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai Budaya dan Filsafat Spiritual dalam Pembiayaan Upacara Adat Karo

Upacara adat Karo tidak semata-mata merupakan ritual keagamaan, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai budaya dan filsafat spiritual masyarakat Tengger Bromo. Salah satu nilai utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah konsep *gotong royong*, yaitu praktik kerja sama kolektif dalam memobilisasi dana dan sumber daya guna mendukung pelaksanaan upacara.

1. Gotong Royong dalam Pembiayaan Ritual

Gotong royong merupakan nilai fundamental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger di Desa Tosari, khususnya dalam konteks pembiayaan upacara adat. Prinsip kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menjadi landasan pengelolaan keuangan upacara Karo. Setiap anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga untuk menjamin keberlangsungan upacara yang dipandang sakral dan bermakna tersebut. Pada tahap pelaksanaan, nilai gotong royong tersebut terefleksi secara nyata dalam berbagai rangkaian ritual. Salah satunya adalah prosesi Kirab Manten Sodor, yang menjadi bagian penting dalam upacara Karo. Dalam prosesi ini, kebutuhan pembiayaan seperti konsumsi, perlengkapan ritual, dan sesaji tidak ditanggung oleh individu tertentu, melainkan dipenuhi secara kolektif oleh warga desa. Selanjutnya, rangkaian ritual dilanjutkan dengan Dederek, yaitu tradisi saling mengunjungi antarrumah warga untuk berdoa bersama. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas dan ikatan kekeluargaan di dalam komunitas. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga Desa Tosari yaitu Ibu Ida:

“Di desa kami, gotong royong itu sangat penting. Misalnya dalam Kirab Manten Sodor, biaya makan dan sesaji ditanggung bersama, tidak hanya oleh satu orang. Begitu juga saat Dederek, kami saling mengunjungi, berdoa bersama, dan menjaga hubungan tetap kuat”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gotong royong tidak sekadar tradisi turun-temurun, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk menjamin keberlanjutan praktik budaya dan keagamaan. Melalui kontribusi kolektif, pembiayaan ritual dikelola secara adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas.

2. Penghormatan terhadap Leluhur sebagai Landasan Filsafat Keuangan Tradisional

Penghormatan terhadap leluhur merupakan nilai inti dalam filsafat keuangan tradisional masyarakat Tengger. Upacara adat tidak dipahami sekadar sebagai warisan budaya, tetapi sebagai wujud penghormatan dan ungkapan rasa syukur kepada leluhur yang diyakini memberikan kehidupan dan perlindungan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Tosari secara sukarela mengumpulkan dana melalui kontribusi bersama untuk membiayai pelaksanaan ritual, yang diposisikan sebagai kewajiban sosial kolektif. Dalam praktiknya, sistem pembiayaan upacara tidak bergantung pada

pembukuan formal sebagaimana dalam akuntansi modern. Meskipun demikian, transparansi tetap dijaga melalui musyawarah terbuka antaranggota masyarakat. Keputusan terkait alokasi dana dikomunikasikan secara terbuka guna menghindari ketimpangan dan kesalahpahaman. Praktik ini mencerminkan nilai kepercayaan, tanggung jawab sosial, serta komitmen kolektif dalam pengelolaan sumber daya komunitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Tosari yaitu Bapak Rudi:

“Upacara ini bukan sekadar tradisi, tetapi cara kami menghormati leluhur. Karena itu, masyarakat dengan sukarela memberikan sumbangan dana untuk pelaksanaan ritual. Ini adalah kewajiban sosial yang harus dijalankan bersama”.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sistem pembiayaan dalam upacara Karo tidak semata-mata merupakan transaksi ekonomi, melainkan juga sarana untuk memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Mekanisme ini menunjukkan dimensi spiritual dan sosial dari keuangan tradisional, di mana keberlanjutan dan keseimbangan ekonomi dijaga melalui kepercayaan kolektif yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya.

3. Keberlanjutan Budaya dalam Perencanaan Keuangan

Keberlanjutan budaya merupakan prinsip utama dalam sistem keuangan tradisional masyarakat Tengger. Dana yang dikumpulkan untuk pembiayaan upacara Karo tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga direncanakan dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang, seperti pelestarian budaya dan kesejahteraan generasi mendatang. Pendekatan akuntansi budaya ini menekankan perencanaan keuangan yang menjamin kesinambungan tradisi. Keputusan terkait alokasi dana sering kali mempertimbangkan kebutuhan kegiatan adat di masa depan, seperti perbaikan infrastruktur desa, pelaksanaan ritual tahunan, serta pendidikan budaya bagi generasi muda agar mereka dapat memahami dan melanjutkan nilai-nilai leluhur. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rudi:

“Dalam hal pembiayaan, kami tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga masa depan. Misalnya, dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan yang berkelanjutan, seperti pendidikan atau pelestarian budaya, agar generasi mendatang juga dapat merasakan manfaatnya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan dalam upacara adat Karo pada masyarakat Tengger menunjukkan adanya kedewasaan berpikir ekonomi yang melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan ritual sesaat. Dalam sistem pembiayaan berbasis komunitas ini, orientasi alokasi dana tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan rangkaian ritus pada hari pelaksanaan, melainkan juga dirancang demi keberlanjutan masa depan komunal. Melalui kacamata akuntansi, pola pikir tersebut mengonfirmasi eksistensi logika penganggaran (*budgeting concept*) yang sangat canggih dan tertata, meskipun seluruh mekanismenya tidak termanifestasikan dalam dokumen tertulis formal.

Melalui kesepakatan komunal yang tidak tertulis, masyarakat secara implisit telah memisahkan alokasi sumber daya ke dalam dua kategori pos anggaran utama. Kategori pertama merupakan pos anggaran operasional ritual (*current ritual expenditure*) yang mencakup pengeluaran dana, logistik, atau hasil bumi yang sifatnya habis pakai (*consumable*) untuk keperluan teknis upacara pada saat itu juga, seperti penyediaan sesaji dan konsumsi warga. Sementara kategori kedua berwujud

pos anggaran investasi sosial jangka panjang (*long-term social investment expenditure*). Tindakan ini berupa pengelolaan surplus atau sisa sumber daya yang terkumpul untuk dialihkan kembali sebagai kas komunitas demi menjamin ketahanan sosial-budaya desa, yang manifestasinya berfokus pada pemeliharaan infrastruktur adat serta aktivitas edukasi kultural (pendidikan nilai-nilai luhur) bagi generasi muda Tengger agar tidak kehilangan jati diri mereka.

Keberadaan pemisahan pos anggaran ini secara akademis meruntuhkan stigma bahwa aktivitas keuangan berbasis ritus adat bersifat konsumtif belaka. Penganggaran informal ini sesungguhnya berfungsi sebagai alat kendali strategis (*strategic control tool*) yang memastikan bahwa pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh warga pada masa kini tidak sampai mengorbankan ketahanan ekonomi komunitas di masa depan.

4. Sistem Akuntansi Budaya dalam Pengelolaan Pembiayaan Upacara Adat Karo

Sistem akuntansi budaya dalam pembiayaan upacara Karo bersifat kolektif dan dibangun di atas kepercayaan komunal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak menggunakan pembukuan formal, sistem ini tetap berfungsi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Dana untuk pelaksanaan upacara dihimpun melalui kontribusi sukarela dari setiap rumah tangga, sehingga setiap keluarga dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan ekonominya. Besaran kontribusi yang diberikan bersifat variatif, sehingga tidak menimbulkan beban finansial bagi individu tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu warga yaitu Bu Ida:

“Kami mengumpulkan dana bersama. Biasanya setiap rumah tangga menyumbang sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000, tergantung kemampuan masing-masing. Semua itu untuk mendukung kelancaran upacara adat.”

Sistem kontribusi kolektif ini mendistribusikan beban keuangan secara merata, mencerminkan prinsip gotong royong dan solidaritas sosial yang dijunjung oleh masyarakat. Selain itu, mekanisme tersebut memastikan keberlanjutan pelaksanaan upacara tanpa mengorbankan kesejahteraan komunitas.

5. Transparansi dalam Penggunaan Dana

Transparansi dalam pemanfaatan dana merupakan prinsip kunci dalam praktik keuangan tradisional masyarakat Tengger. Dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai kebutuhan ritual, seperti penyediaan alat musik, sesaji, konsumsi, serta kebutuhan teknis lainnya. Seluruh pengeluaran diumumkan kepada masyarakat guna mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan kolektif. Keputusan mengenai alokasi dana ditetapkan secara bersama dan disampaikan dalam forum publik, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Objektivitas prinsip transparansi ini dibuktikan secara konkret di lapangan melalui mekanisme akuntabilitas publik yang berlapis. Selama proses persiapan hingga pelaksanaan upacara Karo, bendahara atau pengurus adat melakukan pencatatan manual pada buku register iuran komunal atau lembar catatan lepas. Catatan informal ini berfungsi untuk merekam setiap kontribusi warga, baik berupa uang tunai, takaran hasil bumi (seperti kentang dan beras), maupun sumbangan tenaga kerja. Selanjutnya, validitas data pencatatan tersebut diuji kembali secara terbuka melalui pembacaan rincian pengeluaran secara lisan di hadapan seluruh warga desa pada saat musyawarah pembubaran panitia. Praktik keterbukaan yang

dinamis ini selaras dengan penuturan dari Dukun Adat, Bapak Sutomo, yang menegaskan:

“Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat berapa dana yang terkumpul dan bagaimana penggunaannya. Ini penting agar semua orang tahu bahwa uang tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan upacara, tidak disalahgunakan.”

Keterbukaan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat serta memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan praktik adat. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan administratif yang kaku, melainkan sebagai sarana memperkuat kepercayaan (*trust*) dan komitmen kolektif dalam melestarikan tradisi budaya Tengger secara berkelanjutan.

6. Indeksikalitas dan Refleksivitas dalam Pembiayaan Upacara Adat Karo

Dalam studi etnografi ini, konsep indeksikalitas dan refleksivitas digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menafsirkan serta menyesuaikan praktik pembiayaan upacara adat Karo. Indeksikalitas merujuk pada makna yang dibentuk oleh konteks sosial, yang dalam penelitian ini tercermin melalui praktik kontribusi kolektif. Kontribusi tersebut menegaskan bahwa pembiayaan upacara tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai kewajiban sosial dan spiritual yang melekat pada identitas komunitas. Sementara itu, refleksivitas berkaitan dengan cara masyarakat menafsirkan, mengevaluasi, dan menyesuaikan praktik keuangan mereka secara berkelanjutan. Transparansi dalam pengelolaan dana tidak diwujudkan melalui mekanisme akuntansi modern, melainkan melalui musyawarah terbuka dan partisipasi aktif anggota komunitas.

Musyawarah yang diselenggarakan oleh masyarakat Tengger ini memiliki substansi yang jauh lebih mendalam daripada sekadar rapat koordinasi atau forum mufakat formal. Aktivitas musyawarah tersebut bertransformasi menjadi sebuah mekanisme audit sosial (*social auditing*) yang hidup secara organik, di mana setiap warga komunitas yang hadir secara otomatis bertindak sebagai auditor kolektif. Sebagai auditor kolektif, masyarakat memiliki hak dan ruang terbuka untuk melakukan pengawasan langsung, mengevaluasi keselarasan alokasi sumber daya, serta menguji akuntabilitas pengelolaan dana upacara Karo secara lisan dan transparan. Pola ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap kepercayaan dan adat istiadat sebagai landasan pengelolaan keuangan, dibandingkan ketergantungan pada pencatatan formal. Hubungan antara indeksikalitas dan refleksivitas dalam pembiayaan upacara Karo dapat diringkas sebagai berikut:

Indeksikalitas	Refleksivitas
Dana bersumber dari kontribusi kolektif	Kontribusi dimaknai sebagai kewajiban sosial dan spiritual
Pengelolaan dana tanpa pembukuan formal	Transparansi dijaga melalui musyawarah terbuka
Praktik gotong royong dalam pengelolaan dana	Penekanan pada kesejahteraan komunitas
Tidak menggunakan sistem akuntansi modern	Kepercayaan dan adat lebih diprioritaskan dibanding pencatatan formal

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan tradisional upacara Karo mampu menopang kebutuhan material sekaligus spiritual masyarakat. Kepercayaan

terhadap sistem tersebut berakar pada praktik budaya yang telah berlangsung lama, yang tidak hanya menjaga kesejahteraan komunitas, tetapi juga menjamin kesinambungan budaya. Dengan demikian, pembiayaan ritual tidak sekadar merepresentasikan proses alokasi sumber daya, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pelestarian warisan budaya dan spiritual yang diwariskan lintas generasi. Lebih lanjut, sistem ini mencerminkan kemampuan adaptif komunitas dalam mempertahankan nilai gotong royong dan partisipasi kolektif di tengah perubahan zaman. Meskipun tidak selaras dengan prinsip akuntansi modern, keterlibatan masyarakat secara luas dan praktik musyawarah terbuka terbukti mampu menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang efektif, sehingga menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan budaya komunitas (Parga-Dans et al., 2020).

PEMBAHASAN

Peran *Gotong Royong* dalam Akuntansi Budaya

Gotong royong merupakan elemen sentral dalam sistem keuangan tradisional masyarakat Tengger, di mana setiap anggota komunitas berkontribusi dalam bentuk uang, tenaga, maupun sumber daya lainnya guna menjamin keberlangsungan upacara adat. Sistem ini merepresentasikan suatu bentuk akuntansi budaya yang berbeda dari akuntansi modern, karena lebih menekankan pada keterlibatan sosial dan partisipasi kolektif dibandingkan dokumentasi formal. Dalam masyarakat Tengger, pembiayaan secara kolektif memungkinkan pelaksanaan ritual tanpa membebani individu tertentu secara finansial. Dalam praktiknya, *gotong royong* tidak hanya bertujuan untuk menutup biaya, tetapi juga berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keberlanjutan tradisi budaya (Kurnia et al., 2023).

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan upacara Karo, masyarakat secara bersama-sama menghimpun dana yang digunakan untuk berbagai kebutuhan ritual, seperti penyediaan sesaji, perlengkapan upacara, konsumsi, serta keperluan logistik lainnya. Tidak terdapat ketentuan nominal baku bagi setiap individu dalam memberikan kontribusi, karena sistem ini bertumpu pada keikhlasan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial bersama. Pola tersebut mencerminkan bahwa nilai utama dalam pembiayaan ritual bukanlah besaran kontribusi, melainkan partisipasi dan komitmen kolektif. Di luar fungsi finansialnya, *gotong royong* juga berperan sebagai mekanisme akuntansi sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas (Ortega, 2020). Meskipun tidak terdapat pencatatan keuangan formal sebagaimana dalam sistem akuntansi modern, masyarakat Tengger menerapkan akuntabilitas melalui musyawarah terbuka. Seluruh pengeluaran dibahas secara kolektif untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau ketimpangan dalam alokasi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam sistem keuangan tradisional dijaga melalui keterlibatan aktif komunitas, bukan melalui prosedur administratif semata.

Dalam kerangka akuntansi budaya masyarakat Tengger, *gotong royong* memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pembiayaan upacara. Praktik ini menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas komunal yang diwariskan lintas generasi. Dalam berbagai upacara adat seperti Karo, Kasada, dan Unan-Unan, partisipasi masyarakat baik melalui kontribusi finansial, barang, maupun tenaga merefleksikan komitmen kolektif untuk menjaga keberlangsungan tradisi leluhur (Setiawan, 2018). Keterlibatan komunitas dalam pendanaan upacara adat tidak hanya menjamin keberlanjutan ekonomi ritual, tetapi juga memperkuat relasi sosial

antarwarga. Melalui *gotong royong*, setiap individu berkontribusi dalam menopang kehidupan budaya komunitas, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat ikatan sosial. Kontribusi yang diberikan tidak dipahami sebagai kewajiban yang bersifat memaksa, melainkan sebagai ekspresi kesadaran sosial bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab dalam menjaga warisan budaya.

Lebih jauh, *gotong royong* juga berfungsi sebagai media pendidikan budaya bagi generasi muda. Keterlibatan mereka dalam proses pengorganisasian dan pembiayaan upacara adat memungkinkan terjadinya pewarisan nilai secara langsung, sehingga generasi muda dapat memahami pentingnya kebersamaan dan kesinambungan budaya. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjaga keseimbangan keuangan dalam pelaksanaan ritual, tetapi juga memastikan keberlanjutan identitas budaya masyarakat Tengger di tengah arus modernisasi. Dalam perspektif akuntansi budaya, *gotong royong* juga merepresentasikan bentuk akuntabilitas berbasis komunitas. Berbeda dengan sistem keuangan modern yang bergantung pada pencatatan tertulis dan regulasi formal, sistem ini menekankan transparansi melalui diskusi komunal dan kepercayaan sosial. Seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara kolektif, dengan partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga penggunaan sumber daya benar-benar diarahkan untuk kepentingan bersama.

Transparansi dalam Sistem Keuangan Tradisional

Dalam sistem keuangan tradisional masyarakat Tengger, transparansi merupakan unsur kunci yang menjamin bahwa dana yang dihimpun untuk keperluan upacara adat dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan komunal. Berbeda dengan sistem akuntansi modern yang mengandalkan pencatatan tertulis dan regulasi formal, sistem ini menitikberatkan keterbukaan melalui mekanisme sosial berbasis kepercayaan dan musyawarah komunitas. Seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat dikomunikasikan secara terbuka kepada anggota masyarakat. Meskipun tidak terdapat dokumen formal seperti laporan keuangan atau audit tertulis, masyarakat tetap memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai pengelolaan dana ritual. Kredibilitas prinsip transparansi ini diuji melalui strategi triangulasi data yang mempertemukan bukti pengamatan terlibat (*observasi*), konfirmasi lisan pemuka adat (*wawancara*), dan pelacakan jejak material komunal (*dokumentasi kultural*). Melalui observasi langsung selama persiapan upacara Karo, bendahara adat melakukan pencatatan manual sederhana pada buku saku informal atau lembar catatan lepas guna merekam kontribusi warga, baik berupa uang tunai maupun takaran hasil bumi seperti kentang dan beras. Karakteristik dokumentasi dalam akuntansi budaya ini memang bersifat temporer dan tidak diarsipkan dalam bentuk laporan formal, karena fungsi utamanya hanyalah sebagai alat bantu memori lisan menjelang forum publik.

Validitas data tersebut kemudian diuji secara silang (*cross-check*) melalui forum musyawarah yang melibatkan pemuka adat, kepala desa, serta warga setempat, di mana penerimaan dan pengeluaran dana untuk keperluan ritual dibahas secara kolektif. Dalam forum terbuka tersebut, akuntabilitas diuji secara objektif ketika pengurus adat membacakan rincian pengeluaran berdasarkan catatan manual tersebut, sementara warga desa melakukan verifikasi silang menggunakan ingatan kolektif serta catatan informal mereka mengenai kontribusi yang telah diberikan. Proses

konfirmasi dua arah inilah yang membuat ruang pengawasan tetap berjalan secara efektif meskipun tanpa ketergantungan pada dokumen arsip formal. Anggota komunitas memiliki ruang penuh untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Transparansi dijaga melalui forum musyawarah yang melibatkan pemuka adat, kepala desa, serta warga setempat, di mana penerimaan dan pengeluaran dana untuk keperluan ritual dibahas secara kolektif. Lebih jauh lagi, musyawarah terbuka pada masyarakat Tengger ini sesungguhnya merepresentasikan sebuah bentuk "Audit Sosial" yang memiliki tingkat kepatuhan jauh lebih ketat dan mengikat dibandingkan dengan audit laporan keuangan konvensional. Jika audit modern bersandar pada pemenuhan standar administratif dengan sanksi berupa denda finansial atau legal formal, audit sosial berbasis budaya ini bekerja melalui ruang psikologis dan keyakinan spiritual masyarakat.

Mekanisme kontrol dalam musyawarah diperkuat oleh sanksi moral komunal berupa hilangnya kewibawaan dan rasa malu (*social punishment*) serta sanksi metafisika yang bersumber dari ketakutan akan terkena imbas spiritual (*kualat*) dari para leluhur apabila mencederai amanah dana adat. Rasa takut akan sanksi sosial dan spiritual inilah yang bertindak sebagai sistem pengendalian internal alami, yang secara mutlak memaksa para pengelola dana untuk menjaga integritas dan akuntabilitas tanpa perlu stimulus regulasi formal. Dalam forum tersebut, anggota komunitas memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Pelaporan keuangan dalam sistem ini disampaikan secara lisan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti pemuka adat atau panitia penyelenggara upacara. Setelah suatu ritual selesai dilaksanakan, mereka memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana dana yang telah dikumpulkan dialokasikan. Dalam masyarakat Tengger, norma sosial ini telah diwariskan lintas generasi, sehingga setiap individu yang dipercaya mengelola dana adat memikul tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepercayaan komunitas. Kekuatan utama dari sistem transparansi berbasis komunitas ini adalah kemampuannya dalam mencegah terjadinya penyimpangan keuangan. Karena seluruh anggota masyarakat terlibat secara langsung sebagai auditor kolektif dalam proses pengawasan, peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalkan secara signifikan. Sistem ini memperkuat kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat, karena anggota komunitas merasa yakin bahwa kontribusi yang mereka berikan digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan bersama. Tingkat keterbukaan tersebut menjadi stimulus psikologis yang memotivasi masyarakat untuk terus berkontribusi demi menjamin keberlanjutan pelaksanaan upacara adat Karo secara jangka panjang.

Pengaruh Nilai Spiritual terhadap Akuntansi Budaya

Sistem akuntansi budaya dalam pelaksanaan upacara Karo tidak hanya mencakup pengelolaan dana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ritual, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai spiritual yang diwariskan dalam masyarakat Tengger. Dana yang dihimpun tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen transaksional untuk mendukung keperluan seremonial, melainkan juga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur serta manifestasi nilai spiritual yang hidup dalam komunitas. Masyarakat Tengger meyakini bahwa upacara adat bukan sekadar

peristiwa seremonial, melainkan sarana komunikasi spiritual dengan leluhur. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dalam ritual dipahami tidak hanya dari perspektif material, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual. Setiap individu yang berkontribusi baik melalui uang, barang, maupun tenaga melakukannya dengan niat yang tulus sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam spiritual. Dalam praktiknya, sistem ini menunjukkan keterjalinan yang erat antara dimensi ekonomi dan spiritual. Hal tersebut tercermin dari pemanfaatan dana yang tidak hanya diarahkan pada kebutuhan logistik seperti konsumsi dan perlengkapan upacara, tetapi juga untuk sesaji, hasil pertanian, pelaksanaan doa-doa, serta prosesi sakral yang memiliki makna kosmologis. Pengelolaan dana dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena alokasi yang tidak tepat atau niat yang tidak tulus diyakini dapat memengaruhi berkah yang diterima oleh komunitas. Dengan demikian, praktik akuntansi budaya ini sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial (Narayan & Oru, 2024). Kontribusi yang diberikan secara kolektif menumbuhkan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi ritual, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan spiritual komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, penghimpunan dan pemanfaatan dana dalam upacara Karo merepresentasikan bukan hanya sistem dukungan ekonomi bersama, melainkan juga sarana untuk memperkuat relasi antara manusia, leluhur, dan semesta dalam kosmologi masyarakat Tengger.

Menjaga Keberlanjutan Tradisi melalui Perencanaan Keuangan

Keberlanjutan tradisi dalam masyarakat Tengger tidak hanya bergantung pada partisipasi aktif dalam pelaksanaan upacara adat, tetapi juga pada perencanaan keuangan yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Salah satu temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tengger telah mengembangkan sistem keuangan berbasis komunitas yang memungkinkan pelaksanaan ritual adat terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mekanisme perencanaan keuangan ini tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana untuk kebutuhan upacara dalam satu periode tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Dana yang dihimpun dari kontribusi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan upacara pada tahun berjalan, melainkan sebagian disisihkan atau dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan ritual di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan budaya memerlukan strategi keuangan yang mampu menjamin kesinambungan tradisi, bahkan di tengah potensi tantangan ekonomi di masa depan.

Lebih jauh, sistem ini tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan bagian integral dari nilai-nilai sosial dan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat Tengger. Pelestarian ritual adat dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dalam upacara adat tidak dipandang sekadar sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai bentuk pelestarian budaya yang sarat dengan makna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi budaya dalam masyarakat Tengger tidak terbatas pada aktivitas pencatatan dan distribusi dana, tetapi merepresentasikan mekanisme pengelolaan keuangan berbasis komunitas yang menyeimbangkan dimensi sosial, spiritual, dan keberlanjutan budaya. Melalui

sistem tersebut, masyarakat mampu mempertahankan praktik adat sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap lestari dan diwariskan lintas generasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upacara adat Karo berfungsi sebagai sistem akuntansi yang tertanam secara budaya, di mana pembiayaan diorganisasikan melalui praktik gotong royong, musyawarah, dan kewajiban moral, alih-alih melalui pembukuan formal. Dengan menelusuri bagaimana dana, barang, dan tenaga dimobilisasi, dialokasikan, serta diawasi melalui norma-norma komunal, analisis ini memperlihatkan bahwa akuntansi budaya mampu menopang kesinambungan ritual sekaligus memperkuat kohesi sosial dan komitmen spiritual. Keberlanjutan keuangan berbasis komunitas tidak lahir dari mekanisme pengendalian berbasis buku besar, melainkan dari akuntabilitas yang dipraktikkan secara publik melalui diskusi terbuka, pembagian peran bersama, serta tanggung jawab vertikal terhadap nilai-nilai leluhur sehingga praktik ekonomi selaras dengan identitas budaya dan nilai publik.

Secara teoretis, temuan ini memperluas kajian akuntansi budaya dengan menunjukkan bagaimana akuntabilitas dan pengelolaan (*stewardship*) dijalankan melalui ruang ritual dan peran simbolik, yang menawarkan alternatif terhadap model akuntansi yang berpusat pada entitas usaha dan berorientasi laba. Temuan ini juga memperkaya perdebatan mengenai nilai publik dan tata kelola masyarakat adat dengan menunjukkan bahwa transparansi yang efektif dapat dicapai melalui kepercayaan sosial dan mekanisme adat, dengan luaran yang melindungi sumber daya berwujud sekaligus warisan budaya yang hidup. Dari sisi metodologis, lensa etnometodologi menegaskan peran indeksikalitas dan reflektivitas dalam praktik, dengan mengungkap bagaimana makna “biaya”, “surplus”, dan “penggunaan yang tepat” terus dinegosiasikan melalui interaksi komunal.

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan bahwa kebijakan pelestarian warisan budaya dan pengelolaan keuangan komunitas perlu mengakui serta mendukung musyawarah adat, skema kontribusi yang fleksibel, dan dana antargenerasi yang dialokasikan bagi kesinambungan ritual, pendidikan budaya, dan infrastruktur. Pengaturan hibrida seperti dokumentasi ringan yang dirancang bersama pemimpin komunitas dapat meningkatkan keterhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal tanpa menggerus otonomi lokal. Bagi LSM dan pemerintah daerah, fasilitasi forum pelaporan terbuka yang menghormati otoritas adat berpotensi memperkuat kepercayaan, partisipasi, dan ketahanan komunitas terhadap guncangan ekonomi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain fokus pada satu lokasi, jumlah informan yang terbatas, sifat musiman observasi, serta keterbatasan inheren dari data laporan diri dan kehadiran peneliti. Faktor-faktor tersebut membatasi generalisasi temuan dan menuntut kehati-hatian dalam penerapannya pada konteks masyarakat adat yang beragam. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi komparatif lintas desa Tengger dan komunitas ritual lainnya; desain metode campuran yang mengkuantifikasi arus ekonomi bersamaan dengan etnografi; analisis longitudinal tata kelola dana lintas siklus upacara; serta kajian terfokus mengenai peran keuangan pemuda dan perempuan, pemanfaatan perangkat digital untuk transparansi berbasis komunitas, dan ketegangan antara perlindungan budaya dan komodifikasi ritual dalam konteks pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aptasari, F. W., Falah, M. H., & Akbar, M. M. (2024). Transformasi Ritual Adat: Dari Pelestarian Budaya ke Komoditas Ekonomi. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(3), 378–395. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i3.1204>
- Astina, I. K., Sumarmi, S., Felicia, M. Y., & Kurniawati, E. (2021). The Traditional Ceremonies of Tengger Tribe as a Sustainable Tourism Object in Indonesia. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 39, 1371–1378. <https://doi.org/10.30892/gtg.394spl07-780>
- Burrell, G., & Morgan, G. (2019). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. London: Routledge.
- Choudhary, K., & Rodrigues, K. (2025). The Importance of Cost Accounting in Medium-Sized Businesses. *IJSAT-International Journal on Science and Technology*, 16(1), 1–7. <https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i1.2017>
- Coyne, C. J., & Mathers, R. L. (2011). Rituals: An Economic Interpretation. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 78(1–2), 74–84. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.12.009>
- Dawson, N. M., Coolsaet, B., Sterling, E. J., Loveridge, R., Gross-Camp, N. D., Wongbusarakum, S., Sangha, K. K., Scherl, L. M., Phan, H. P., Zafra-Calvo, N., Lavey, W. G., Byakagaba, P., Idrobo, C. J., Chenet, A., Bennett, N. J., Mansourian, S., & Rosado-May, F. J. (2021). The Role of Indigenous Peoples and Local Communities in Effective and Equitable Conservation. *Ecology and Society*, 26(3), 19. <https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319>
- Erlina, E., Rambe, O. S., & Rasdianto, R. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferry, L., Ahrens, T., & Khalifa, R. (2019). Public Value, Institutional Logics and Practice Variation During Austerity Localism at Newcastle City Council. *Public Management Review*, 21(1), 96–115. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1462398>
- Flesher, T. K., & Flesher, D. L. (2022). Accounting, Greed, and Beliefs in a Nineteenth Century Communal Religious Society. *Accounting History*, 27(2), 259–276. <https://doi.org/10.1177/10323732211032300>
- Gray, S. J. (1998). Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally. *Abacus*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1988.tb00200.x>
- Haryanto, J. T. (2014). Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger Malang Jatim. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 201–213. <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.15>
- Hidayah, N. N., Lowe, A., & Woods, M. (2019). Accounting and Pseudo Spirituality in Islamic Financial Institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 22–37. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Huda, M. T. (2019). Peran Budaya dalam Membangun Hubungan Antara Umat Beragama di Suku Tengger. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(1), 13–30. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i1.527>

- Jayasinghe, R., Liyanage, N., & Baillie, C. (2021). Sustainable Waste Management Through Eco-entrepreneurship: An Empirical Study of Waste Upcycling Eco-enterprises in Sri Lanka. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 23(2), 557–565. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-01140-0>
- Kurnia, H., Khasanah, I. L., Kurniasih, A., Lamabawa, J., Darto, Y., Muhamad, Wawuan, F. Z., Fajar, N. R., Zulva, D., Oktaviani, S. Y., Wicaksono, F. A., Kaihatu, Y., & Santoso, M. I. B. (2023). Gotong Royong Sebagai Sarana dalam Mempererat Solidaritas Masyarakat Dusun Kalangan. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 277–282. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.754>
- Mentel, A. (2022). Rituals and Group Solidarity: An Ethnographic Case Study. *Slovenský Národopis*, 70(2), 228–247. <https://doi.org/10.31577/SN.2022.2.20>
- Narayan, A. K., & Oru, M. (2024). Accounting as a Social and Moral Practice: Bridging Cultures, Balancing Indigenous Factors, and Fostering Social Accountability. *Meditari Accountancy Research*, 32(5), 1734–1757. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2023-2044>
- Nugroho, S. S., Absori, A., Harun, H., & Rahmanta Setiajadi. (2019). Customary Law Harmonization Norma Interaction and Legal State in the Management of Natural Resources Conservation. *Proceedings of the Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society, and Technology, WESTECH 2018, December 8th, 2018, Medan, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2283961>
- Panggeso, A. G., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Transparency and Accountability in Public Financial Reporting: Implementation and Challenges in the Digital Era: A Systematic Literature Review. *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(6), 979. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i6.11875>
- Parga-Dans, E., González, P. A., & Enríquez, R. O. (2020). The Social Value of Heritage: Balancing the Promotion-preservation Relationship in the Altamira World Heritage Site, Spain. *Journal of Destination Marketing & Management*, 18, 100499. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100499>
- Poelzer, G., Frimpong, R., Poelzer, G., & Noble, B. (2023). Community as Governor: Exploring the role of Community between Industry and Government in SLO. *Environmental Management*, 72(1), 70–83. <https://doi.org/10.1007/s00267-022-01681-0>
- Prasetyo, A. (2022). The Phenomenon of Gotong Royong in Java Community: A Case Study Nyumbang. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(7), 792–801. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i7.145>
- Priyastiwi, P. (2016). Pengaruh Budaya terhadap Akuntansi, Auditing dan Praktik Akuntansi Internasional. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 3(1), 78–95. <https://doi.org/10.32477/jrm.v3i1.81>
- Sherpa, P. (2024). Role of Customary Governance in Resource Management of a Legal Pluralist Indigenous Community. *SMC Journal of Sociology*, 1(1), 101–119. <https://doi.org/10.3126/sjs.v1i1.63807>
- Steenbergen, D. J. (2016). Strategic Customary Village Leadership in the Context of Marine Conservation and Development in Southeast Maluku, Indonesia. *Human Ecology*, 44(3), 311–327. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9829-6>

- Thahirah, K. A., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Achsin, M. (2025). Visualization of Accounting and Indigenous People Research: A Bibliometric Review Using R. *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, 9(2), 491–503. <https://doi.org/10.62527/joiv.9.2.2878>
- Vidwans, M., & De Silva, T.-A. (2023). Indigenous Peoples and Accounting: A Systematic Literature Review. *Accounting History*, 28(2), 232–261. <https://doi.org/10.1177/10323732231158406>
- Vu Hoang, K. (2021). The Benefits of Preserving and Promoting Cultural Heritage Values for the Sustainable Development of the Country. *E3S Web of Conferences*, 234, 76. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123400076>
- Wang, B., Xia, L., & Wu, A. M. (2022). Social Development with Public Value: An International Comparison. *Social Indicators Research*, 162(2), 909–934. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02805-5>